

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada 41Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



Drs. SOEROSO, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP.19640921 198803 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016–2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 229.969.694.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.218.719.755.450,- (95,11%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 11 (sebelas) program dengan 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan.

Dinas Pendidikan sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui penyediaan anggaran bantuan biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada setiap satuan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan antara lain membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembenahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Gambaran Organisasi | 3 |
| 1.3.1 Dasar Pembentukan, Tugas dan Fungsi | 3 |
| 1.3.2 Struktur Organisasi..... | 4 |
| 1.3.3 Sumber Daya Manusia..... | 6 |
| 1.4 Isu Strategis | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis | 9 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran..... | 10 |
| 2.4 Indikator Kinerja Utama | 11 |
| 2.5 Perjanjian Kinerja 2018 | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja | 15 |
| 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama | 16 |
| 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama | 19 |
| BAB IV PENUTUP | 40 |
| LAMPIRAN : | |
| Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan | |
| Perjanjian Kinerja Perubahan 2018 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4).

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1. Dasar Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5), selanjutnya dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan disebutkan bahwa, Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dindik adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja di bidang Pendidikan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan;
- d. pengkoordinasian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan;
- e. pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional pendidik dan kependidikan non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan serta pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;

- g. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- h. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal ataupun non formal;
- i. pembinaan dan pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan;
- j. penyusunan pedoman, pelaksanaan, dan evaluasi kompetisi peserta didik, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
- k. pembinaan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
- l. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah;
- m. pengawasan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- n. pengawasan dan pembinaan pelayanan perpustakaan sekolah dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM);
- o. pengkoordinasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan;
- p. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- q. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- r. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1.) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2.) Sub Bagian Keuangan;
 - 3.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SD;
 - 2.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SMP;
 - 3.) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PAUD;
 - 2.) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PNF;
 - 3.) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF;
 - 2.) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
 - 3.) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
 - 2.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - 3.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri atas:

- 1.) Jabatan Fungsional Pengawas SD;
- 2.) Jabatan Fungsional Pengawas SMP;
- 3.) Jabatan Fungsional Pengawas TK/PAUD;

4.) Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal

5.) Jabatan Fungsional Guru.

1.3.3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota didukung oleh 104 (seratus empat) orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.3.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah (orang) |
|-----|-------------------|----------------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | 4 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | 3 |
| 5. | Kepala Seksi | 12 |
| 6. | Pengawas SMP | 2 |
| 7. | Pengawas SD | 6 |
| 8. | Pengawas PAUD/TK | 4 |
| 9. | Penilik PLS | 1 |
| 10. | Pranata Komputer | 1 |
| 11. | Pelaksana PNS | 45 |
| 12. | Pelaksana Non PNS | 24 |
| | Jumlah | 104 |

Tabel 1.3.3.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

| No. | Pangkat/Golongan | Jumlah (orang) |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 1. | Pembina Tingkat I / IV.b | 10 |
| 2. | Pembina / IV.a | 16 |
| 3. | Penata Tingkat I / III.d | 8 |
| 4. | Penata / III.c | 12 |
| 5. | Penata Muda Tingkat I / III.b | 10 |
| 6. | Penata Muda / III.a | 7 |
| 7. | Pengatur Tingkat I / II.d | 5 |
| 8. | Pengatur / II.c | 4 |
| 9. | Pengatur Muda Tingkat I/II.b | 0 |
| 10. | Pengatur Muda | 8 |
| | Jumlah | 80 |

Tabel 1.3.3.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | PNS | Non PNS |
|-----|--------------------|-----------|-----------|
| 1. | S2 | 11 | - |
| 2. | S1 | 40 | 7 |
| 3. | D3 | 10 | 5 |
| 4. | D2 | - | - |
| 5. | D1 | - | - |
| 6. | SLTA | 16 | 11 |
| 7. | SLTP | 2 | 1 |
| 8. | SD | 1 | - |
| | Jumlah | 80 | 24 |

Tabel 1.3.3.4
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

| NO. | Usia | PNS | Non PNS | Jumlah |
|-----|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | 56 tahun lebih | 21 | | 21 |
| 2. | 51-55 tahun | 20 | 1 | 21 |
| 3. | 46-50 tahun | 10 | 3 | 13 |
| 4. | 41-45 tahun | 10 | 1 | 11 |
| 5. | 36-40 tahun | 12 | 4 | 16 |
| 6. | 31-35 tahun | 7 | 5 | 12 |
| 7. | 26-30 tahun | | 4 | 4 |
| 8. | 18-25 tahun | | 6 | 6 |
| | Jumlah | 80 | 24 | 104 |

1.3.4. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam masa tumbuh kembang anak;
2. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peningkatan akses layanan pendidikan dengan lebih memperhatikan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
4. Penambahan Unit Sekolah Baru dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, rasio ketersediaan sekolah, dan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
5. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan disertai upaya penyelenggaraan pendidikan yang lebih terjangkau;
6. Pengembangan pendidikan ketrampilan disertai dengan penumbuhan jiwa kewirausahaan kreatif;

7. Peningkatan kualitas pendidikan budi pekerti didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia.
8. Peningkatan akses layanan pendidikan melalui pemberian beasiswa;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki serta menyelaraskan dengan kebutuhan pasar;
10. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI);
11. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal S1/D4 dan linear dengan bidang tugasnya, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI;
12. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Landasan Hukum, Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi Rencana Strategis, Target IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 050/A.2/2308.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Pekalongan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatkan layanan PAUD yang merata dan bermutu;
2. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar yang merata dan bermutu;
3. Meningkatkan layanan Pendidikan Non Formal yang merata dan bermutu;
4. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan mutu, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi;
6. Membentuk kepribadian peserta didik yang berkarakter.

b. Sasaran

Sasaran dari Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PAUD;
2. Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan Pendidikan Dasar;
3. Meningkatnya mutu dan lulusan Pendidikan Dasar;
4. Meningkatnya akses dan layanan ketersediaan Pendidikan Non Formal;
5. Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatnya mutu tata kelola organisasi;
7. Meningkatnya mutu tata kelola satuan pendidikan;
8. Terbentuknya kepribadian peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan:

Tabel IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018

| NO | INDIKATOR | RUMUS | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PAUD | | | | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th | $\frac{\text{Jumlah seluruh siswa PAUD usia 3-6 th}}{\text{Jumlah penduduk usia 3-6 tahun}}$ | 49,50 % | 50,00 % | 50,50 % | 51,00 % | 51,50 % | 52,00% |
| | Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan Pendidikan Dasar | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | RUMUS | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun | $\frac{\text{Jml penduduk usia sekolah 7-12 th yang sekolah}}{\text{Jml penduduk usia sekolah 7-12 th}}$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun | $\frac{\text{Jml penduduk usia sekolah 13-15 th yang sekolah}}{\text{Jml penduduk usia sekolah 13-15 th}}$ | 99,95 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Angka Melanjutkan ke SMP/MTs | $\frac{\text{Jumlah siswa baru SMP/MTs th pelajaran berjalan}}{\text{Jumlah lulusan SD/MI th pelajaran sebelumnya}}$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA | $\frac{\text{Jumlah siswa baru SMA/SMK/MA th pelajaran berjalan}}{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs th pelajaran sebelumnya}}$ | 98,47 % | 98,48 % | 98,48 % | 98,49 % | 98,49 % | 98,50% |
| Sasaran 3 : Meningkatnya mutu dan lulusan Pendidikan Dasar | | | | | | | | |
| 6 | Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI | $\frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Ujian Sekolah/Madrasah}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta Ujian SD/MI}}$ | 6,75 | 6,80 | 6,85 | 6,90 | 6,95 | 7,00 |
| 7 | Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs | $\frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Ujian Nasional SMP/MTs}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta Ujian SMP/MTs}}$ | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 |
| Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PNF | | | | | | | | |
| 8 | Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | $\frac{\text{Jml penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan}}{\text{Jml penduduk usia sekolah yang tidak sekolah}}$ | 37,50 % | 40,00 % | 47,50 % | 50,00 % | 52,50 % | 60,00% |
| 9 | Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | $\frac{\text{Jumlah anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak putus sekolah}}$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 5 : Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; | | | | | | | | |
| 10 | Persentase Pendidik memiliki sertifikat | $\frac{\text{Jumlah guru memiliki sertifikasi profesi}}{\text{Jumlah seluruh guru}}$ | 53,49 % | 54,27 % | 55,05 % | 55,83 % | 56,61 % | 57,39% |

| NO | INDIKATOR | RUMUS | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | profesi | | | | | | | |
| | <i>Sasaran 6 : Meningkatnya mutu tata kelola organisasi;</i> | | | | | | | |
| 11 | Persentase capaian Kinerja | <u>Jumlah persentase realisasi capaian indikator kinerja</u> Banyaknya indikator kinerja | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | <i>Sasaran 7 : Meningkatnya mutu tata kelola satuan pendidikan;</i> | | | | | | | |
| 12 | Persentase capaian SPM pendidikan dasar | <u>Jumlah Indikator SPM yang Tercapai</u> Jumlah Seluruh Indikator SPM | 55,56 % | 59,26 % | 62,96 % | 66,67 % | 70,37 % | 74,07% |
| | <i>Sasaran 8 : Terbentuknya kepribadian peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;</i> | | | | | | | |
| 13 | Persentase pembelajaran pendidikan agama | Jumlah sekolah yang menerapkan pembelajaran pendidikan agama Jumlah seluruh sekolah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.4. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberi amanah/tanggungjawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari Perjanjian Kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2018 terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan

kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018. Berikut adalah Perjanjian Kinerja di bidang pendidikan Tahun 2018 dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th | 50,50% |
| 2 | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun | 100% |
| 3 | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun | 100% |
| 4 | | Angka Melanjutkan ke SMP/MTs | 100% |
| 5 | | Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA | 98,48% |
| 6 | Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar | Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI | 6,85 |
| 7 | | Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs | 7,15 |
| 8 | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF | Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | 47,50% |
| 9 | | Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | 100% |
| 10 | Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi | 57,68% |
| 11 | Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi | Persentase capaian Kinerja | 80% |
| 12 | Meningkatnya Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan | Persentase capaian SPM pendidikan dasar | 62,96% |
| 13 | Terbentuknya Kepribadian Peserta Didik yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia. | Persentase pembelajaran pendidikan agama | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat |
|------------|-------------------------|
| < 100% | Tidak Tercapai |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target |
| > 100% | Melebihi Target |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

| NO. | Kategori | Rata-Rata % Capaian |
|-----|---------------|---------------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
Tahun 2018

| No. | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % Capaian | Target Akhir RPJM D/Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|-----|--|---|--------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th | 50,50% | 56,10% | 111,09 % | 52,00 % | 107,88% |
| 2 | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun | 100% | 106,79 % | 106,79 % | 100% | 106,79% |
| 3 | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun | 100% | 103,24 % | 103,24 % | 100% | 103,24% |
| 4 | | Angka Melanjutkan ke SMP/MTs | 100% | 101,68 % | 101,68 % | 100% | 101,68% |
| 5 | | Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA | 98,48% | 116% | 117,79 % | 98,50 % | 117,76% |

| No. | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % Capaian | Target Akhir RPJM D/Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|-----|--|--|--------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6 | Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar | Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI | 6,85 | 72,64 | 106,04 % | 7,00 | 103,77% |
| 7 | | Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs | 7,15 | 57,36 | 80,22% | 7,30 | 78,57% |
| 8 | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF | Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | 47,50% | 48,95% | 102,95 % | 60,00 % | 81,5% |
| 9 | | Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi | 55,05% | 55,20% | 100,27 % | 57,39 % | 96,18% |
| 11 | Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi | Persentase capaian Kinerja | 80% | 83,04% | 103,81 % | 80% | 100% |
| 12 | Meningkatnya Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan | Persentase capaian SPM pendidikan dasar | 62,96% | 68% | 108 % | 74,07 % | 91,80% |
| 13 | Terbentuknya Kepribadian Peserta Didik yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia. | Persentase pembelajaran pendidikan agama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ada yang melebihi target, sama dengan target dan kurang/tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

- sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu indikator APK PAUD 3-6 Tahun, indikator APS 7-12 Tahun, indikator APS 13-15 Tahun, indikator Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, indikator Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA, indikator Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI, indikator Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi dan indikator Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar capaian kinerjanya melebihi target.
- Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase pembelajaran pendidikan agama
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya dan target sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Capaian Sasaran 1
Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PAUD

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Tahun 2018 | | % Capaian | Target Akhir Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 - 6 th | 47,05% | 60,38% | 50,50% | 56,10% | 111,09 | 52,00% | 107,88 |
| | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | 111,09 | | |

Berdasarkan tabel diatas indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 tahun sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 50,50 %. Dari target tersebut tahun 2018 berhasil tercapai sebesar 56,10% dengan capaian kinerja sebesar 111,09% atau interpretasi sangat baik, Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang positif. Pencapaian tersebut tak lepas dari sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan bersama Bunda PAUD Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan kepada lembaga PAUD tentang pentingnya akreditasi lembaga PAUD Formal sehingga meningkatkan mutu pendidikan PAUD Formal di Kota Pekalongan, selain itu juga dilakukan pendataan anak usia dini yang belum masuk PAUD sehingga diharapkan pada tahun 2019 semua anak usia dini bisa mengikuti pendidikan anak usia dini dan berdampak pada peningkatan jumlah murid PAUD Formal.

Pencapaian target indikator APK PAUD 3-6 tahun didukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 2.720.150.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.527.607.173,- (92,92%).

Program Pendidikan Anak Usia Dini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

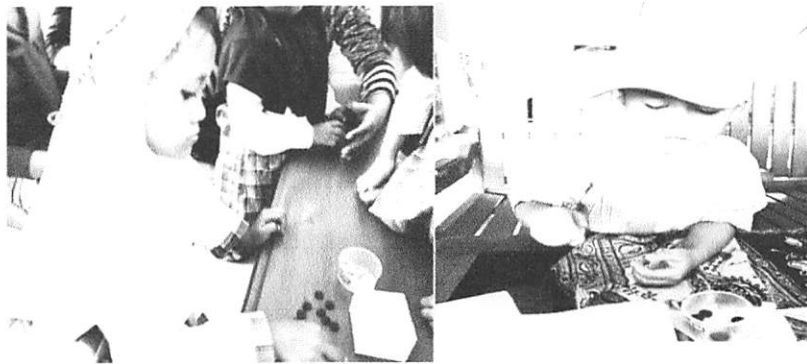
| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|---|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| 1 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas paker | Jumlah TK mendapat bantuan rehab pagar | TK | 1 | 1 |
| 2 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab | Ruang | 36 | 36 |
| | | Jumlah ruang kelas baru PAUD yang dibangun | Ruang | 1 | 1 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan | Lomba | 3 | 3 |
| 4 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah peserta sosialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter | Orang | 680 | 568 |
| | | Jumlah kurikulum baru yang dikembangkan | Kurikulum | 1 | 1 |
| 5 | Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya | Lembaga | 4 | 4 |
| 6 | Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah guru PAUD peserta diklat berjenjang | Guru PAUD | 80 | 80 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| 7 | Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal | Jumlah pengadaan whiteboard | Buah | 2 | 2 |
| | | Jumlah pengadaan printer scanner | Unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah pengadaan laptop | Unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah PAUD yang mendapat bantuan perlengkapan kantor, peralatan dapur, mebel & APE | PAUD | 1 | 1 |
| 8 | Penyelenggaraan Gebyar PAUD | jumlah lomba anak yang diselenggarakan | Lomba | 13 | 12 |
| 9 | Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integrative | Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif | Orang | 120 | 120 |
| 10 | Fasilitasi Penguatan Organisasi Mitra PAUD | Jumlah Jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi | Organisasi | 4 | 4 |
| 11 | Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) | Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan | PAUD Negeri | 7 | 7 |

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021. Kegiatan strategis yang mendukung capaian indikator program Pendidikan Anak Usia Dini adalah Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan APK PAUD Formal.

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, memfasilitasi siswa PAUD berkebutuhan khusus untuk tetap bersekolah di PAUD Formal yang menyediakan pendidikan inklusi bagi anak usia dini di 4 (empat) TK Negeri.

Foto dibawah ini menggambarkan aktivitas siswa PAUD di TK Negeri Pembina Timur dan Utara, anak diajarkan untuk berkreasi dengan kancing baju sebagai alat peraganya, adapun hasil kreativitas siswa dipajang diruang kelas sehingga setiap siswa bisa melihat hasil kreativitas antar siswa.



Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini

Analisis Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Tahun 2018 | | % Capaian | Target Akhir Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun | 103,91 % | 107,62 % | 100% | 106,79 % | 106,79 | 100% | 106,79 |
| 2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun | 103,34 % | 107,09 % | 100% | 103,24 % | 103,24 | 100% | 103,24 |
| 3 | Angka Melanjutkan ke SMP/MTs | 113,35 % | 105,08 % | 100% | 101,68 % | 101,68 | 100% | 101,68 |
| 4 | Angka Melanjutkan ke SMP/MTs | 105,12 % | 100,78 % | 98,48% | 116% | 117,79 | 98,50% | 117,76 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | 107,37 | | |

Berdasarkan tabel diatas 4 indikator dari sasaran Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan Dasar, semuanya berhasil melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 107,37 atau dengan interpretasi sangat baik. Meningkatnya persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs, hal ini tak lepas dari peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbiaya rendah bahkan gratis karena sekolah bisa memanfaatkan bantuan Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) secara tepat guna.

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Tahun 2018 | | % Capaian | Target Akhir Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI | 72,80 | 7,53 | 6,85 | 72,64 | 106,04 | 7,00 | 103,77 |
| 2 | Nilai rata-rata Ujian sekolah SMP/MTs | 58,30 | 6,13 | 7,15 | 57,36 | 80,22 | 7,30 | 78,57 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | 93,13 | | |

Berdasarkan tabel diatas sasaran Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SD/MI dengan capaian sebesar 72,64 dan indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTs dengan capaian sebesar 57,36. Indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SD/MI berhasil mencapai target, namun tidak dengan Indikator Nilai rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTs yang belum berhasil mencapai target. Nilai rata-rata UN SMP/MTs pada tahun ajaran 2017/2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan soal-soal UN SMP/MTs diluar prediksi try out dan berdampak pada penurunan nilai rata-rata UN se Jawa Tengah.

Pencapaian target indikator dalam sasaran meningkatnya akses dan ketersediaan layanan pendidikan dasar serta sasaran Meningkatnya Mutu dan Lulusan Pendidikan Dasar didukung oleh Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 45.748.074.000,- dan realisasi sebesar Rp.43.661.221.341,- (95,44%).

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--------------------------------|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| 1 | Penambahan ruang kelas sekolah | Jumlah ruang kelas baru SD/MI yang dibangun | Ruang | 2 | 2 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | | Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun | Ruang | 2 | 2 |
| 2 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker | Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pavingisasi halaman | Sekolah | 1 | 1 |
| | | Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pembangunan pagar | Sekolah | 5 | 5 |
| | | Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pengadaan tanah | Sekolah | 1 | 1 |
| | | Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pembangunan pagar | Sekolah | 8 | 8 |
| | | Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan peninggian halaman | Sekolah | 3 | 3 |
| | | Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pavingisasi halaman | Sekolah | 1 | 1 |
| | | Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapatkan perbaikan lapangan basket | Sekolah | 1 | 1 |
| 3 | Pembangunan ruang ibadah | Jumlah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang ibadah | Sekolah | 1 | 1 |
| 4 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Jumlah KM/WC SD yang dibangun | Unit | 12 | 12 |
| 5 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Jumlah ruang kelas SMP yang direhab | Ruang | 5 | 5 |
| | | Jumlah ruang kelas SD yang direhab | Ruang | 2 | 2 |
| | | Jumlah ruang kelas baru AKN yang dibangun | Ruang | 2 | 2 |
| | | Jumlah ruang kantor SMP yang direhab | Ruang | 1 | 1 |
| | | Jumlah ruang laborat SMP yang direhab | Ruang | 1 | 1 |
| | | Jumlah ruang serbaguna SMP yang direhab | Ruang | 1 | 1 |
| 6 | Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar | Jumlah cabang lomba dipertandingkan | Lomba | 43 | 14 |
| | | Jumlah kegiatan training center | Kegiatan | 2 | 2 |
| 7 | Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK) | Jumlah ruang kelas SD yang direhab | Ruang | 42 | 42 |
| | | Jumlah ruang kelas baru yang dibangun | Ruang | 19 | 19 |
| | | Jumlah KM/WC yang direhab | Unit | 18 | 18 |
| | | Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan | paket | 19 | 19 |
| 8 | Fasilitasi operasional | Jumlah sd negeri terfasilitasi FOP | SD | 71 | 71 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|---|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta) | | | | |
| 9 | Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta) | Jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS | sekolah | 146 | 147 |
| 10 | Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri | Jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP | SMP | 17 | 17 |
| 11 | Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta) | Jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya | sekolah | 37 | 37 |
| 12 | Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Persentase jumlah sekolah penerima dana BOS | persen | 100 | 100 |
| 13 | Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | Jumlah SD penerima dana BOS | sekolah | 71 | 71 |
| 14 | Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | Jumlah SMP penerima dana BOS | sekolah | 17 | 17 |
| 15 | Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD | Jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi | SD | 4 | 4 |
| 16 | Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP | Jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi | SMP | 1 | 1 |
| 17 | Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP | Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs | Sekolah | 183 | 183 |
| 18 | Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK) | Jumlah rehab ruang kelas SMP | Ruang | 17 | 17 |
| | | Jumlah pembangunan ruang kelas SMP | Ruang | 5 | 5 |
| | | Jumlah rehab KM/WC SMP | Ruang | 21 | 21 |
| | | Jumlah pengadaan komputer PC | Paket | 5 | 5 |
| 19 | Pengadaan komputer SD/SMP | Jumlah pengadaan PC UNBK | Unit | 202 | 202 |
| | | Jumlah pengadaan serer UNBK | Unit | 7 | 7 |
| | | Jumlah pengadaan jaringan komputer UNBK | Instalasi | 7 | 7 |

Pelaksanaan kegiatan pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Kegiatan strategis pada program ini adalah Penambahan ruang kelas sekolah, Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah dan Fasilitasi Operasional Pendidikan SD dan SMP yang sangat berpengaruh pada meningkatnya APK SD/MI dan SMP/MTs, meningkatnya Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang

SMP/MTs serta menurunnya angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Kegiatan- kegiatan tersebut secara langsung berpengaruh pada menurunnya beban masyarakat melalui pendidikan berbiaya rendah bahkan gratis untuk jenjang SD/SMP.

Foto pelaksanaan FOP tahun 2018, salah satunya di SD Negeri Landungsari 1, dana FOP dimanfaatkan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, perbaikan proyektor LCD yang ada di ruang kelas dan perbaikan lantai ruang kelas sekolah.

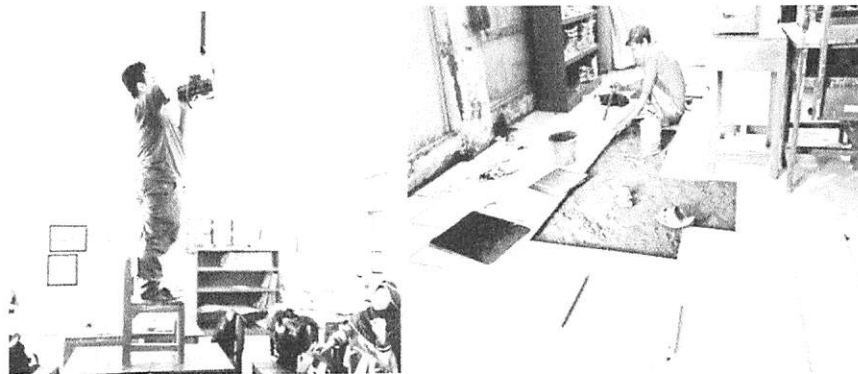


Foto Fasilitas Operasional Pendidikan Sekolah di SD Negeri Landungsari 1



Foto Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah di SDN Pabean

Analisis Capaian Sasaran 4
Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Tahun 2018 | | % Capaian | Target Akhir Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|----|--|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | Na | 48,76 % | 47,50 % | 48,9 % | 102,95 % | 60,00% | 81,5 % |
| 2 | Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100 % |
| | | | | | | 101,47% | | |

Berdasarkan tabel diatas sasaran Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan dengan capaian kinerja 48,76% dan Persentase anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan dengan capaian kinerja 100%.

Dengan capaian kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya akses dan ketersediaan layanan PNF berhasil mencapai target dengan rata-rata capaian 101,47% atau dengan interpretasi sangat baik.

Pencapaian target-target dalam sasaran Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Layanan PNF didukung oleh Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp.1.392.135.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.241.364.100,- (89,17%) dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|---|--|-------------|-------|----------------|
| | | | satuan | Angka | |
| 1 | Pengembangan pendidikan keaksaraan | Jumlah peserta pembelajaran keaksaraan | Orang | 60 | 60 |
| 2 | Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal | Jumlah peserta bintek manajemen PNF | Orang | 25 | 25 |
| 3 | Try Out ujian kesetaraan | Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti tryout ujian kesetaraan | Lembaga | 31 | 31 |
| 4 | Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan | Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti ujian kesetaraan | Lembaga | 31 | 31 |
| 5 | Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C | Jumlah lembaga kejar paket A yang terfasilitasi biaya pendidikan | Lembaga | 3 | 3 |
| | | Jumlah lembaga kejar paket B yang terfasilitasi biaya pendidikan | Lembaga | 10 | 10 |
| | | Jumlah lembaga kejar paket C yang terfasilitasi biaya pendidikan | Lembaga | 19 | 19 |
| 6 | Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan | Jumlah sekolah/madrasah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan | Lembaga | 146 | 146 |

Pelaksanaan kegiatan pada program Pendidikan Non Formal diitujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Kegiatan yang menonjol pada program ini adalah pengembangan pendidikan keaksaraan dan kegiatan Penyelenggaraan Paket A, B dan C .

Kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan bertujuan untuk mengentaskan buta aksara bagi warga usia 15-59 tahun, berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan bersama Kelurahan pada tahun 2018 terdapat 249 penduduk potensi buta aksara yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A,B dan C, berdasarkan Perwal nomor 80 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan program Paket C Kota Pekalongan,bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C Kota Pekalongan diberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di Kota Pekalongan. Bantuan tersebut berupa bantuan biaya pendaftaran program paket A, B sebesar @ Rp.155.000,00 dan paket C Rp. 170.000,00 per warga belajar untuk siswa tahun pelajaran 2018/2019 serta biaya paket pembelajaran program paket A Rp. 3.000,00 ; paket B Rp. 4.000,00 dan paket C Rp. 5.000,00 per warga belajar per pertemuan.

Berikut adalah foto pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan di kelurahan Kandang Panjang dan kegiatan pendidikan kesetaraan di salah satu penyelenggara pendidikan di daerah Poncol.

Kegiatan pendidikan kesetaraan paket A, B, C Kegiatan pendidikan keaksaraan



Analisis Capaian Sasaran 5

Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Tahun 2018 | | % Capaian | Target Akhir Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi | 55,00% | 57,68 % | 55,05 % | 55,20 % | 100,27 | 57,39% | 96,18 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | 100,27 | | |

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 55,05 %. Dari target tersebut tahun 2018 berhasil tercapai sebesar 55,20% dengan capaian kinerja sebesar 100,27% atau interpretasi sangat baik. Pencapaian target indikator Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp.19.389.592.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.261.166.900,- (99,34%) dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|---|---|---------------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| 1 | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik | Jumlah peserta PLPG/PPG | Guru | 135 | 135 |
| 2 | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah peserta lulus pre tes PPG | Orang | 100 | 80 |
| 3 | pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek peningkatan kompetensi | Orang | 50 | 50 |
| 4 | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan | jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya | Kepala sekolah | 28 | 28 |
| 5 | Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT | Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan | Orang | 1.984 | 1997 |
| | | Jumlah sekolah/madrasah penerima bantuan jasa kinerja pendidik dan tenaga kependidikan | Sekolah /madrasah | 95 | 94 |
| 6 | Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi | Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi | Guru/kepala sekolah | 18 | 20 |
| | | Jumlah pengawas sekolah terpilih sebagai pengawas sekolah berprestasi | Orang | 3 | 0 |
| 7 | Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru | Jumlah penerbitan karya ilmiah | kali terbit | 2 | 2 |
| | | Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah | Orang | 15 | 15 |
| 8 | Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula | Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula | Guru | 30 | 1 |
| | | Jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan penilaian kinerja guru yang diterbitkan | Dokumen | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS yang disalurkan | Guru | 8 | 3 |
| | | Jumlah Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS | Guru | 100 | 100 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|--|----------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | | yang disalurkan | | | |
| 10 | Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan | Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan | Kasus | 12 | 8 |
| 11 | Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi | Jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF | Cabang lomba | 7 | 7 |
| 12 | Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI | Jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi | KKG | 12 | 12 |
| 13 | Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs | Jumlah anggota Forum MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop dan lokakarya peningkatan pembelajaran | Guru | 40 | 50 |
| 14 | Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS) | Jumlah pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Laporan Program Kepengawasan yang disusun. | Dokumen | 2 | 2 |
| 15 | Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah | Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD dan SMP mengikuti bintek peningkatan kompetensinya | Kepala sekolah | 95 | 50 |
| 16 | Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan | Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya | Guru | 200 | 200 |

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021. Kegiatan yang menonjol dan mendukung tercapainya indikator program adalah Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi dan Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT. Kegiatan tersebut memfasilitasi Pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S1/D4, mengikuti bintek peningkatan

kompetensi dan meningkatkan kesejahteraan PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK.

Sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Perlindungan Tahun 2018, bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Pekalongan perlu diberikan Bantuan Penghargaan dan Perlindungan kepada bukan PNS dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag serta Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian bantuan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018, bahwa untuk meringankan beban pembiayaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberikan gaji kepada pendidik dan tenaga kependidikan perlu diberikan bantuan jasa kinerja (Jaskin) dan tenaga kependidikan SD/MI dan SMP/MTs, pemberian Harlindung dan Jaskin memberikan dampak positif terhadap kinerja PTK non PNS dalam memberikan pelayanan pendidikan dan membantu peningkatan mutu sekolah.

Foto berikut menjelaskan tentang kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan GTT/PTT dimana Sekretaris dinas pendidikan didampingi Kabid PTK dan Kasi PTK SMP memberikan sosialisasi kepada GTT/PTT penerima harlindung; Penyerahan Jasa Kinerja kepada sekolah swasta oleh Walikota Pekalongan sebagai bentuk apresiasi bantuan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di Kota Pekalongan; Foto Pelaksanaan UKG tahun 2018 di TUK SMA Negeri 3 diikuti 177 guru yang memenuhi kualifikasi dan 59 guru dinyatakan lulus UKG sehingga berhak mengikuti Pendidikan Lanjutan Pendidikan Guru (PLPG) dan. Foto pelatihan pendidik kelas atas terhadap hasil belajar siswa tematik tahun 2018, para guru diberikan sosialisasi tentang penyusunan hasil belajar siswa oleh pendidik kelas atas oleh Kabid PTK dan PTK SMP.



*Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan GTT/PTT
Penyerahan Jaskin kepada Sekolah Swasta oleh Walikota Pekalongan*



*Pelaksanaan UKG di SMAN 3 Kota Pekalongan
Tahun 2018*

Pelatihan guru kelas atas tahun 201

Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Tahun 2018 | | % Capaian | Target Akhir Renstra | % Capaian Terhadap Target Akhir |
|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Persentase capaian Kinerja | 87,78% | 91,67% | 80% | 83,04 | 103,81% | 80% | 103,81% |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | 103,81% | | |

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase Capaian Kinerja sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 80,00%. Dari target tersebut tahun 2018 berhasil tercapai sebesar 83,04% dengan capaian kinerja sebesar 103,81% atau interpretasi sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang sebesar 91,67%, terdapat kenaikan sebesar 8%.

Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya mutu tata kelola organisasi pada tahun 2018

berhasil dicapai dengan melebihi target.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Mutu Tata Kelola Organisasi didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | 12 | 12 |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan | bulan | 12 | 12 |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor | bulan | 12 | 12 |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | bulan | 12 | 12 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bulan | 12 | 12 |
| 7 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | Bulan | 12 | 12 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 12 | 12 |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | Bulan | 12 | 12 |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah fasilitasnya koordinasi dan konsultasi luar daerah | Org/kali | 443 | 305 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|--------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| 1 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang dibangun | Unit | 1 | 1 |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah ruang yang dipasang wallpaper | ruang | 3 | 3 |
| | | Jumlah taman dinas yang terpelihara | unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah gedung kantor | unit | 2 | 2 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | | yang terpelihara secara rutin/berkala | | | |
| 3 | Penyusunan Detail Enginnering | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | Unit | 41 | 41 |
| 4 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas | unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah pengadaan Ac Split | unit | 2 | 2 |
| | | Jumlah pengadaan AC Standing | unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah pengadaan gordyn vertical blind | meter | 45 | 27 |
| | | Jumlah pengadaan komputer server | unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah pengadaan Laptop | unit | 7 | 7 |
| | | Jumlah pengadaan Printer tinta (MP287) | unit | 8 | 8 |
| | | Jumlah pengadaan printer wifi | unit | 1 | 0 |
| | | Jumlah pengadaan printer laser | unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah pengadaan Harddisk | unit | 1 | 1 |
| | | Jumlah pengadaan Kursi rapat | unit | 35 | 63 |
| | | Jumlah pengadaan dispenser | unit | 3 | 3 |
| | | Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi | unit | 1 | 0 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Bulan | 12 | 12 |
| | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | |
| 1 | Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) | Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun | dokumen | 6 | 6 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|---|---|--|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| 3 | Penyusunan Profil SKPD | Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun | dokumen | 3 | 3 |
| 4 | Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD | Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan | dokumen | 1 | 1 |
| 5 | Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah dan Provinsi | Jumlah kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan yang dikelola | Laporan | 92 | 792 |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) | | | | | |
| 6 | Promosi kegiatan unggulan dan inovatif | Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik | Kegiatan | 3 | 3 |

Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Tahun 2017 | | % Capaian | Tahun 2021 | % Capaian |
|---------------------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | |
| 1 | Persentase capaian SPM pendidikan dasar | 48,15% | 59,26% | 66% | 111,37 | 74,07% | 89,10 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 111,37 | | |

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 59,26% %. Dari target tersebut tahun 2017 berhasil tercapai sebesar 66% dengan capaian kinerja sebesar 111,37% atau interpretasi sangat baik.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Mutu Tata Kelola Satuan Pendidikan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|--|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan | Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan | Aplikasi | 1 | 1 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|--|---|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | Dana Pembantuan | | | | |
| 2 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data | Kegiatan | 1 | 1 |
| 3 | Pendataan Anak Usia Sekolah | Jumlah laporan anak usia sekolah | Laporan | 1 | 1 |
| 4 | Fasilitasi penyusunan APBS | Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS | Sekolah | 127 | 127 |
| 5 | Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan | Jumlah Pelatihan Aplikasi Dapodik | pelatihan | 2 | 2 |
| | | Jumlah bulan fasilitasi pendataan | bulan | 12 | 12 |
| 6 | Penyelenggaraan UN dan UNPK | jumlah lembaga terfasilitasi penyelenggaraan UNPK | lembaga | 3 | 4 |
| | | jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan UNPK | sekolah | 146 | 146 |
| | | jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan US | sekolah | 66 | 37 |
| 7 | Penerbitan Tabloid Pendidikan | Jumlah penerbitan majalah pendidikan | Edisi | 6 | 4 |
| 8 | Pengembangan Sistem Manajemen Mutu | Jumlah surveilance sertifikat iso | Sertifikat | 1 | 1 |
| 9 | Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan | jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Hardiknas, Harteknas, Hari Guru) | kegiatan | 3 | 3 |
| | | Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan insan pendidikan berprestasi | kegiatan | 1 | 1 |
| 10 | Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar | Jumlah laporan capaian SPM yang tersusun | Laporan | 1 | 1 |
| 11 | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah | Jumlah SMP/MTs difasilitasi proses akreditasinya | sekolah | 5 | 5 |
| | | Jumlah SD/MI | Sekolah | 34 | 34 |

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|---|--|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | | difasilitasi proses akreditasinya | | | |
| 12 | Penyelenggaraan Akreditasi PAUD | Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi | PAUD | 75 | 111 |
| | | Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya | PAUD | 75 | 111 |
| 13 | Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Dasar | Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online | Sekolah | 31 | 31 |
| 14 | Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi) | Jumlah dokumen profil pendidikan | Dokumen | 1 | 1 |

Analisis Pencapaian Sasaran 8
Terbentuknya Kepribadian Peserta Didik yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia.

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2016 | Tahun 2017 | | % Capaian | Tahun 2021 | % Capaian |
|---------------------------|--|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | |
| 1 | Persentase pembelajaran pendidikan agama | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 100 | | |

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase Capaian Persentase Pembelajaran Pendidikan Agama sesuai target Renstra 2016-2021 ditargetkan mencapai 100%. Dari target tersebut tahun 2017 berhasil tercapai sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% atau interpretasi sangat baik. Pencapaian target indikator Persentase pembelajaran pendidikan agama didukung oleh Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan dengan anggaran sebesar Rp.3.023.469.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.023.469.000,- (99,13%) dengan kegiatan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran Terbentuknya Kepribadian Peserta Didik yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Indikator Output | Target 2018 | | Realisasi 2018 |
|----|---|--|-------------|-------|----------------|
| | | | Satuan | Angka | |
| | Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan | | | | |
| | Peningkatan Pembelajaran BTQ | Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport | orang | 1.200 | 1.189 |
| | | Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ | siswa | 4000 | 3.923 |

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian s

asaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase nilai capaian 111,09 % atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 107,37% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 93,13% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101,47 % atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,27 % atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,81 % atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,37 % atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 (delapan) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 229.969.694.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 218.719.755.450,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,11 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 11.249.938.550,- yang merupakan Silpa Belanja Tidak Langsung yaitu Rp. 8.416.763.193,- dan Silpa Belanja Langsung Rp. 2.833.175.357,-.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



Drs. SOEROSO, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP.19640921 198803 1 007